

IMPLEMENTASI SISTEM ABSENSI *QR BARCODE* DALAM PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH KOTA SEMARANG PADA MASA PANDEMI *COVID-19*

Wijayanti Pulung Rahayu
NPP. 28.0712

Asdaf Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur

Email: rahayupulung@gmail.com

ABSTRACT

The development of increasingly advanced technology requires the Government to use it to improve public services. Not only technology, excellent and disciplined employees are also very much needed during this Covid-19 pandemic. Because fingerprint attendance cannot be used because it is feared that it can transmit the Covid-19 virus, the Semarang City Government uses qrBarcode attendance as a substitute. The purpose of this study was to determine the implementation of the qrBarcode attendance system in enforcing the discipline of Semarang City Government employees during the Covid-19 pandemic. This research is a qualitative research with descriptive method with an inductive approach and analysis of implementation using George C. Edwards III's theory of Public Policy Implementation. Data collection techniques by means of observation, semi-structured interviews, and documentation. The findings in this study are the implementation of the qrBarcode attendance system is quite good, seen from the communication between parties which is quite good, the resources are classified as good but there are still shortcomings, the disposition that there are still deficiencies in employee discipline, and the bureaucratic structure that still has shortcomings. The implementation of the qrBarcode attendance system in discipline enforcement is quite good but still needs to be improved in several aspects. The implementation of this qrBarcode attendance requires more binding regulations so that its implementation can be coordinated and run better.

Keywords: Implementation, qrBarcode Attendance System, Discipline

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang semakin maju menuntut Pemerintah untuk memanfaatkannya untuk meningkatkan pelayanan publik. Tidak hanya teknologi, pegawai yang prima dan disiplin juga sangat dibutuhkan di masa pandemi Covid-19 ini. Dikarenakan absensi *fingerprint* tidak dapat digunakan karena dikhawatirkan dapat menularkan virus Covid-19, maka Pemerintah Kota Semarang menggunakan absensi *qrBarcode* sebagai penggantinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi sistem absensi *qrBarcode* dalam penegakan disiplin pegawai Pemerintah Kota Semarang di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan pendekatan induktif dan analisis terhadap implementasi menggunakan teori George C. Edwards III tentang Implementasi Kebijakan Publik. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Temuan dalam penelitian ini yaitu implementasi dari sistem absensi *qrBarcode* ini cukup baik dilihat dari komunikasi antar pihak yang cukup baik sumber daya yang tergolong baik namun masih terdapat kekurangan, disposisi yang masih terdapat kekurangan pada kedisiplinan pegawai, dan struktur birokrasi yang masih ada kekurangan.

Implementasi dari sistem absensi *qrBarcode* dalam penegakan disiplin tergolong cukup baik namun masih perlu ditingkatkan lagi pada beberapa aspek. Penerapan absensi *qrBarcode* ini membutuhkan regulasi yang lebih mengikat sehingga pelaksanaannya dapat terkoordinasikan dan berjalan lebih baik lagi.

Kata kunci : Implementasi, Sistem Absensi *qrBarcode*, Disiplin

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dewasa ini, dapat kita lihat perkembangan teknologi pada berbagai bidang yang sangat cepat dan kompleks. Pemanfaatan teknologi sangat dibutuhkan di berbagai bidang, baik bidang kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, juga bidang kepegawaian. Dengan melihat kondisi pelayanan publik di Indonesia yang masih rendah, pada 2019, Ahmad Alam Saragi, anggota Ombudsman dalam artikel “Potret Buram Pelayanan Publik Indonesia” oleh Tri Apriyani pada 21 Maret 2020, <https://yoursay.suara.com/news/2020/03/21/95345/potret-buram-pelayanan-publik-di-indonesia>, menyampaikan bahwa kualitas pelayanan publik di Indonesia semakin rendah, dan juga kurang sistematisnya penerimaan keluhan dari masyarakat.

Dengan kondisi seperti itu, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, yang diterbitkan pada 2014 Nomor 5 ini, pada Pasal 127 Ayat (4) dinyatakan bahwa Sistem Informasi ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) berbasis teknologi informasi yang mudah dipraktekkan, mudah diakses, dan sistem keamanan yang dipakai terpercaya. Selain itu, teknologi sebagai faktor dalam kesuksesan *e-government*, Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi salah satu faktor dalam mewujudkan pelayanan publik yang memuaskan. Dengan data yang diteliti oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menyampaikan bahwa pada 2019, jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang menggunakan internet hampir sebanyak 150 juta jiwa dengan penetrasi 56%

(dalam artikel “Penggunaan Internet di Indonesia” oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI pada 14 Agustus 2019, (<https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/penggunaan-internet-di-indonesia/>)). Maka, mau tidak mau Aparatur Sipil Negara juga harus memiliki kompetensi yang baik di bidang teknologi agar dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Selain itu, kedisiplinan pegawai merupakan salah satu faktor yang penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik dan melayani dengan prima.

Absensi manual kini telah berkembang seiring penggunaan teknologi, yaitu dengan menggunakan *fingerprint*. *Fingerprint* merupakan alat pemindai sidik jari dari pegawai suatu kantor yang telah didaftarkan. Selama penggunaan absensi menggunakan *fingerprint*, mesin serta pemindai tidak mengalami kendala yang berarti. Namun, pada masa penyebaran virus *covid-19* ini, absensi menggunakan *fingerprint* tidak lagi menjadi alternatif. Masa pandemi *covid-19* membuat manusia harus berjaga jarak antara satu dengan yang lain dan menghindari sentuhan antara sesama. Hal ini dilakukan untuk mencegah semakin bertambahnya angka penyebaran virus *covid-19* ini.

Dengan adanya penjelasan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparat dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) mengeluarkan surat edaran yang isinya menjelaskan tentang aturan mengenai sistem kerja ASN dalam masa tatanan normal baru, yaitu Surat Edaran mengenai Sistem Kerja ASN dalam Tatanan Normal Baru Nomor 67 Tahun 2020 tanggal 4 September 2020. Surat Edaran ini merupakan hasil perubahan dari peraturan sebelumnya, yakni Surat Edaran MenPAN-RB No. 58/2020.

Kota Semarang merupakan wilayah yang tinggi angka penyebaran Covid-19 nya sehingga menanggapi Surat Edaran yang telah diterbitkan oleh MenPAN RB, Walikota Semarang juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor B. 3521/61.2/IX/2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Pada Nomor 3 huruf (g) menerapkan sistem absensi yang menggunakan *QR Barcode* baik untuk yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah maupun di kantor, hal ini diterapkan guna untuk memantau kedisiplinan pegawai Pemerintah Kota Semarang di masa pandemi Covid-19 ini. Masing-masing individu harus mengunduh aplikasi *scan barcode* pada gawainya masing-masing melalui situs <https://smg.city/presensionline>. Dengan pengunduhan aplikasi melalui situs tersebut, identitas ASN Kota Semarang akan terdaftar, karena aplikasi yang digunakan hanya bisa diakses oleh Pegawai Kota Semarang yang telah terdaftar.

1.2 Permasalahan

Ada beberapa permasalahan dalam implementasi absensi *qrBarcode* ini, masih belum tertibnya pegawai dalam melaksanakan pengisian kehadiran baik terlambat maupun tidak hadir tanpa keterangan hal ini diutarakan oleh salah seorang pegawai di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang yang mengungkapkan bahwa angka keterlambatan dalam rentang 1-5 jam akumulatif dalam satu bulan.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman di bidang teknologi bagi pegawai yang berumur 45-60 tahun, dengan jumlah yang banyak ini maka masih

perlu penjelasan secara berulang agar dapat paham dan dapat menggunakan aplikasi absensi dengan baik.

mengenai sistem *QR Barcode* itu sendiri, menurut fakta dari *website* portal Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, yaitu terkait rapat koordinasi permasalahan aplikasi presensi *online* di Kota Semarang. Rapat ini diselenggarakan pada 15 Juli 2020. Rapat tersebut membahas permasalahan dalam penggunaan aplikasi presensi yaitu keluhan karena terjadi perlambatan. Hal ini merupakan bahasan yang penting karena dapat mempengaruhi dengan besar TPP yang didapatkan oleh masing-masing pegawai berdasarkan waktu melaksanakan absen, dan database yang digunakan masih terbatas sehingga hampir melampaui koneksi maksimal (Artikel “rapat koordinasi pembahasan permasalahan aplikasi presensi online pada 15 Juli 2020 oleh Diskominfo Kota Semarang semarangkota.go.id/p/1855/rapat_koordinasi_pembahasan_permasalahan_aplikasi_presensi_on_line).

1.3 Penelitian Sebelumnya

Sebelum penelitian, ada juga beberapa penelitian yang serupa, yaitu terkait dengan topik sistem absensi *Barcode*. Penelitian Pemanfaatan QR Barcode Dalam Memudahkan Proses Absensi Siswa Berbasis Aplikasi Mobile (Akhiruddin Pulungan dan Alfa Saleh, 2019), mengemukakan bahwa absen dengan menggunakan *barcode* sudah berjalan baik pada *smartphone* siswa, dan juga aplikasi yang digunakan membutuhkan internet untuk mengoperasikannya.

Penelitian Yiyi Supendi yaitu Pemanfaatan Teknologi *Qr-Ccode* Pada Sistem Preseensi Mahasiswa Berbasis Mobile (Yiyi Supendi, Irwin Supriadi, Agustinus

A. W., 2019) menjelaskan bahwa aplikasi absensi ini dapat mengurangi kecurangan Mahasiswa dalam pengisian absen saat perkuliahan berlangsung di dalam kelas. Selain itu, proses perekapan absen juga dapat lebih mudah untuk dilakukan oleh dosen pengampu.

Penelitian selanjutnya yaitu oleh Anas Tasia Erna Widayanti yang berjudul Penerapan Absensi Berbasis Sistem *Barcode* dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di Madrasah Aliyah Nurul Huda Sedati Sidoarjo (Anas Tasia E. W., 2019) pada pannelitian ini dijelaskan bahwa absensi berbasis *barcode* bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa, tidak ada manipulasi data dan melatih tanggung jawab siswa untuk mengisi daftar kehadiran dengan langkah siswa meng-*scan* kartu pelajarnya yang disertai dengan *barcode* di mesin *scanner* kemudian siswa akan tau apakah dia tepat waktu atau tidak.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang mana ruang lingkup yang dilakukan peneliti yaitu implementasi sistem absensi *qrBarcode* dalam penegakan disiplin pegawai Pemerintah Kota Semarang, penelitian ini merupakan penelitian baru karena pembahasan mengenai implementasi *qrBarcode* ini memiliki sasaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat Daerah Kota Semarang. Selain itu, penelirian ini juga menghubungkan sistem absensi *qrBarcode* dengan bagaimana hal tersebut digunakan untuk penegakan disiplin di Pemerintah Kota Semarang.

1.5 Tujuan

Penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas terkait dengan implementasi sistem absensi *qrBarcode* dalam penegakan disiplin pegawai Pemerintah Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19.

II Metode

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, penelitian ini menggunakan 3 teknik analisis data yaitu dengan mereduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan yang terakhir yaitu dengan menarik kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan untuk analisis data yang berupa tulisan, lisan, maupun perilaku manusia, penulis tidak menghitung data-data yang telah didapatkan sehingga tidak menghasilkan hasil berupa angka (Afrizal (2016:12). Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen kunci untuk meneliti objek secara ilmiah, lalu menetapkan triangulasi untuk pengumpulan data, dan menganalisis data dengan induktif, dan nantinya hasil yang diperoleh lebih menekankan pada arti jawaban, dan mengkonstruksi fenomena secara umum (Sugiyono, 2018:26). Sedangkan teori yang digunakan dalam menganalisis fokus penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan publik oleh George C. Edwards III yang mengemukakan bahwa implementasi memiliki 4 (empat) dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. (Syafri, 2016:27)

Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data, penulis melakukan wawancara secara bertahap kepada 18 informan yang penulis dapatkan melalui *purposive sampling* yang terdiri dari Asisten Sekretariat Daerah kota Semarang (1 orang), Kepala Bagian Sekretariat Daerah (2 Orang), Kepala Subbagian (3 orang), Staf Sekretariat Daerah (10 orang), Pegawai Inspektorat (1 orang), Kepala Bidang Kesejahteraan dan Disiplin Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang (1 orang). Selain itu penulis juga menggunakan teknik *snowball sampling* untuk memperkuat data yang diperoleh penulis sebelumnya

III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Komunikasi

3.1.1 Transmisi

Dalam indikator ini, penulis menganalisis dengan cara observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Melalui ketiga cara tersebut penulis mendapatkan hasil yaitu bahwa dalam indikator transmisi sudah baik hal ini dijelaskan berdasarkan adanya surat edaran yang diterbitkan oleh Sekretariat Daerah dan juga BKPP terkait pemberitahuan penerapan absensi *qrBarcode* pada dan juga bulan dan juga penjelasan dari beberapa informan yang mengungkapkan bahwa penyampaian dilakukan secara formal dan informal yaitu melalui surat edaran dan juga penyampaian di setiap kegiatan pertemuan.

3.1.2 Kejelasan

Dalam indikator kejelasan, masiuh terdapat beberapa kekurangan mengenai kejelasan tata cara penggunaan absensi *qrBarcode*. Hal ini dialami oleh pegawai yang berumur 45 tahun keatas yang jumlahnya banyak yaitu:

No.	Usia 21-30		Usia 31-40		Usia 41-50		Usia 51-60		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	11	7	28	27	39	34	51	25	222

Kurang jelasnya tata cara penggunaan dikarenakan tidak adanya penerbitan SOP dan penyampaiannya hanya berupa penjelasan lisan antar pegawai satu dengan lainnya.

3.1.3 Konsistensi

Dalam tahap konsistensi sudah berjalan dengan baik yaitu ditunjukkan dengan serentakny penerapan sistem absensi *qrBarcode* yang serentak di seluruh OPD yang ada di Kota Semarang termasuk wilayah Kecamatan dan juga kelurahan. Dengan adanya surat edaran dan penyampaian secara lisan maka penyampaian mengenai penerapan absensi *qrBarcode* tidak menjadi penyampaian yang multitafsir serta mplementasi absensi *qrBarcode* ini juga masih terus dilakukan hingga saat ini dan untuk kedepannya.

3.2 Sumber Daya

3.2.1 Staf

Unsur dalam implementasi kebijakan adalah pelaksana kebijakan itu sendiri. Pada penelitian ini berfokus pada staf yang berstatus PNS yang ada di Sekretariat Daerah Kota Semarang, dengan beberapa pihak terlibat yaitu Diskominfo sebagai

pembuat absensi yaitu pada Bidang Layanan e-Government dan juga BKPP sebagai pengawas sekaligus kanal pelaporan, dan juga yang menerapkan pemberian TPP sesuai absensi yang dilaporkan yaitu pada bagian Kesejahteraan dan Disiplin BKPP Kota Semarang. Pada bagian staf, kompetensi dari pembuat absensi itu sendiri sudah sesuai karena memiliki latar belakang pendidikan komputer dan ahli di bidangnya, sebagai admin atasan langsung telah mengajukan 2 nama yang memiliki posisi di bidang kepegawaian tiap OPD dan juga menguasai penggunaan absensi itu sendiri sehingga dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan penjelasan kepada rekan lainnya. Pelaksana dari absensi ini juga diupayakan memahami penggunaan gawai masing-masing. Namun dalam tahun ini masih ada kekurangan pada jumlah admin pelaporan yaitu di Sekretariat Daerah hanya ada orang yang merekap dan melaporkan ke BKPP sehingga admin tersebut harus bekerja dengan ekstra.

3.2.2 Wewenang

Indikator berikutnya dalam sumber daya adalah wewenang. Wewenang merupakan hal yang dapat dilakukan sesuai dengan hak dan jangkauan suatu jabatan yang dimiliki, baik pihak pembuat kebijakan maupun pelaksana kebijakan. Wewenang dalam hal ini yaitu terkait dengan wewenang yang diberikan kepada setiap staf dan koordinasi dalam melaksanakan kebijakan. Dalam indikator ini, masing-masing pihak telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas OPD masing-masing, dalam melaksanakan kewenangannya sudah berjalan dengan baik walaupun belum ada penerbitan SOP mengenai pihak-pihak yang terlibat.

3.2.3 Informasi

Informasi merupakan hal yang diperlukan sebagai pedoman untuk melaksanakan suatu kebijakan oleh pelaksana kebijakan sehingga dapat sesuai dengan ketentuan. Dalam aplikasi absensi ini terdapat fitur-fitur yang dapat diakses maupun tidak. Fitur yang dapat diakses oleh seluruh pegawai yaitu informasi pribadi, riwayat waktu absensi, dan juga pilihan pelaksanaan absensi bagi pegawai WFH dan juga WFO. Selanjutnya, fitur yang tidak dapat dilihat yaitu informasi keseluruhan pegawai karena hanya dapat diakses oleh admin. Selain itu, isian kegiatan yang diinput oleh pegawai WFH juga tidak dapat dilihat oleh atasan langsung sehingga informasi yang didapatkan tidak lengkap.

3.2.4 Fasilitas

Fasilitas merupakan salah satu indikator dalam sumber daya dimana juga berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan. Indikator ini juga seharusnya dipenuhi karena jika tidak maka akan menghambat implementasi suatu program. Dalam implementasi absensi *qrBarcode* ini fasilitas sudah baik yaitu dengan tersedianya *gadget* yang dimiliki masing-masing pegawai dan juga koneksi internet yang ada pada setiap Bagian di Sekretariat Daerah Kota Semarang. Selain itu, dana juga telah terpenuhi hingga saat ini. Namun masih ada hal yang sebaiknya diperbaiki yaitu terkait dengan jumlah admin pelaporan absensi tiap OPD yang hanya satu orang sehingga dapat menghindari terjadinya keterlambatan pelaporan kepada BKPP Kota Semarang. Selanjutnya juga perwujudan harapan yaitu adanya integrasi antara absen dan juga aplikasi perolehan TPP.

3.3 Disposisi

3.3.1 Komitmen

Komitmen merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan dengan konsisten dan tidak berubah-ubah. Dalam pelaksanaan kebijakan juga seharusnya memiliki unsur untuk menuntut sikap konsisten dari pelaksana kebijakan. Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa penerapan sistem absensi *qrBarcode* masih belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih sering terjadinya pegawai yang terlambat dan kurang disiplin menaati jam kerja. Hal ini disampaikan berdasarkan penjelasan informan yang penulis telah wawancarai.

Selain itu, dikarenakan kebijakan yang masih longgar sehingga pegawai masih santai karena dapat menghitung maksimal keterlambatan yang tercatat dalam akumulasi satu bulan. Kurangnya disiplin para pegawai juga disebabkan masih adanya toleransi dari atasan kepada pegawai yang lupa absen maupun yang masuk keterangan dengan menggunakan surat izin sakit sehingga pegawai yang bersangkutan tidak mendapat potongan TPP.

3.3.2 Insentif

Insentif merupakan suatu keuntungan atau biaya tertentu yang dapat menjadi pendorong bagi pelaksana kebijakan agar melaksanakan kebijakan dengan baik dan sungguh-sungguh. Pemberian insentif dapat menentukan sikap pelaksana sehingga dapat meningkatkan kedisiplinan pegawai. Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pegawai tidak termotivasi untuk disiplin menaati jam kerja karena tidak ada insentif ataupun penghargaan yang diberikan. Para pegawai hanya berusaha tidak melewati batas keterlambatan setiap bulannya yaitu sebesar

5 jam sehingga tidak mendapatkan potongan TPP (Tambahkan Penghasilan Pegawai).

3.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah salah satu hal yang penting dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Hal yang menjadi perhatian adalah mengenai SOP (*Standard Operating Procedures*) dimana memuat tahapan-tahapan dalam melaksanakan suatu kebijakan, dalam pembahasan ini yaitu mengenai absensi dengan sistem *qrBarcode*. dalam penerapan absensi *qrBarcode* ini belum ada penerbitan SOP sehingga masing-masing pihak yang terlibat melaksanakan kewenangannya sesuai dengan tupoksi masing masing OPD.

3.5 Faktor Penghambat

Faktor-faktor yang menghambat dalam implementasi sistem absensi *qrBarcode* dalam penegakan disiplin pegawai Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19 ini yaitu:

- a. Belum tersedianya SOP dalam pelaksanaan absensi *qrBarcode*;
- b. Ketidaktertiban pegawai Sekretariat Daerah Kota Semarang masih ditemukan;
- c. Belum ada insentif yang diberikan apabila pegawai disiplin;
- d. Pengawasan yang belum berjalan baik;
- e. Sistem absensi ini hanya bisa dioperasikan di *gadget* android saja.

3.6 Upaya

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat yaitu:

- a. Melakukan Sosialisasi di Setiap ada Pertemuan antar OPD;

- b. Dibentuknya Peraturan Walikota mengenai kebijakan pemberian TPP terbaru untuk tahun 2021;
- c. Membuat jadwal pengecekan oleh beberapa tim dan pembagian tugas pengawasan;
- d. Pembuatan perizinan kepada pihak sistem operasi iOS;
- e. Integrasi Sistem absen dan pendapatan TPP.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penerapan sistem absensi *qrBarcode* memiliki dampak positif dalam penegakan disiplin pegawai karena pengawasan dan pemantauan oleh atasan menjadi lebih mudah, selain itu dengan masing-masing gawai yang digunakan oleh masing-masing pegawai menjadikan proses pencatatan kehadiran baik datang maupun pulang menjadi lebih akurat dan mudah untuk dilaksanakan oleh para pegawai.

Penerapan absensi *qrBarcode* ini juga menjadi alternatif di masa pandemi karena masing-masing pegawai tidak perlu khawatir akan tertular virus Covid-19 melalui interaksi absensi yang sebelumnya menggunakan absensi *fingerprint*.

3.8 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan beberapa kendala implementasi sistem absensi *qrBarcode* dalam penegakan disiplin pegawai pemerintah Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19 yaitu belum adanya SOP penggunaan absensi *qrBarcode*, belum tertibnya pegawai dalam melaksanakan pencatatan kehadiran, belum adanya kebijakan mengenai pemberian insentif bagi pegawai yang disiplin, dan

juga absensi ini hanya dapat dioperasikan melalui gawai dengan sistem operasi android.

IV KESIMPULAN

Berdasarkan hasil magang yang dilakukan oleh penulis pada bab sebelumnya yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai Implementasi Sistem Absensi *Qr Barcode* Dalam Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah Kota Semarang Pada Masa Pandemi *Covid-19* yang dilakukan di Sekretariat Daerah Kota Semarang, penulis menarik kesimpulan bahwa implementasi sistem absensi *qrBarcode* ini masih mengalami beberapa kekurangan pada setiap dimensi yang dijadikan penulis sebagai acuan analisis yaitu menggunakan teori George C. Edwards III. Dengan beberapa kekurangan tersebut tidak menjadikan implementasi absensi ini menjadi buruk, namun perlu untuk ditingkatkan lagi agar implementasi kedepannya dapat berjalan lebih baik lagi.

Dalam penelitian ini penulis juga menemukan beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi berjalannya penerapan absensi ini. Dengan beberapa faktor penghambat tersebut pemerintah telah berupaya untuk mengupayakan untuk mengatasinya.

V DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Syafri, Wirman. 2016. *Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik*. Jatinangor: Pers Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

M.A, Afrizal, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Peraturan

Surat Edaran Nomor B. 3521/61.2/IX/2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tata Normal Baru Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Website

Suara.com, diakses dari <https://yoursay.suara.com/news/2020/03/21/095345/potret-buram-pelayanan-publik-di-indonesia>, pada Hari Jumat, tanggal 25 September 2020, pukul 16:00.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika), diakses dari <https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/penggunaan-internet-di-indonesia/>, pada Hari Kamis, tanggal 24 September 2020, pukul 11:00.

Pemerintah Kota Semarang, diakses dari semarangkota.go.id/p/1855/rapat_koordinasi_pembahasan_permasalahan_aplikasi_presensi_online, pada hari Jumat 25 September 2020, pukul 11:00.

Skripsi dan Jurnal

Supendi, Yiyi, dkk. (2019). Pemanfaatan Teknologi *Qr-Code* Pada Sistem Preseensi Mahasiswa Berbasis *Mobile* ,diakses dari <http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/semnastik/article/view/2912/0> .2019.

Pulungan, Akhiruddin dan Alfa Saleh (2019). Proses Absensi Siswa Dalam Memudahkan Proses Absensi Siswa Berbasis Aplikasi Mobile, diakses dari <https://docplayer.info/184379040-Pemanfaatan-qr-code-dalam-memudahkan-proses-absensi-siswa-berbasis-aplikasi-mobile.html> .2019.

Erna, Anas Tasia. (2019). Penerapan Absensi Berbasis Sistem *Barcode* dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di Madrasah Aliyah Nurul Huda Sedati Sidoarjo, diakses dari <http://digilib.uinsby.ac.id/38923/>. 2019.